

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.
- Hadisoeparto, H. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Liberty.
- Khalid, A. (2014). PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Al' ADI*, 4(11), 1–36.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. P.T.Alumni.
- Lestari, E. C. (2016). *PENEGAKAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA TERHADAP TERJADINYA PENAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pelaksanaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Polres Mojokerto)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Cet.1).
- PUSHEP. (2021). Mengevaluasi Putusan Penolakan MK Soal Uji Formil dan Materiil UU Minerba. *PUSAT STUDI HUKUM DAN PERTAMBANGAN*.
- Riyanto, M. H., & Farhan, A. T. D. (2020). Asas-Asas Putusan Hakim. *Direktorat Jendaral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 1, 1–8. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>
- Santoso, T. I. (2008). *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*. Setara Press.
- Soedarso, B. P. (2009). POTRE HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM ERA UU NO 4 TAHUN 2009. *Indonesia Journal Of International Law*, 6(3), 410–428.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu PerUndang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Sonata, D. (2016). *PERAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KOTA BATAM*. UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MALANG.

Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta.

Wulandari, Liestiarini., S.H., M. H. (2020). *LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG BERKELANJUTAN*. Pohon Cahaya.

### **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang -Undang No. 5 Tahun 2004

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### C. Jurnal

- Ginting, B. S. (2017). Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok. *Jurnal Law Pro Justitia*, II(2), 1–75. <https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVGsQQRGxmtCLPGGbzJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1>
- Lestari, D. S., & Rustamaji, M. (n.d.). ANALISIS ATAS KESALAHAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN YANG MENYIMPANGI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN. *Jurnal Verstek*, 7(3), 1–7.
- Mawar, S. (2016). METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM. *Jurnal Justisia*, 1(1), 1–18.
- Oktafianto Dennis, H. M. A. (2016). ANALISIS KEKHILAFAN HAKIM YANG NYATA SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 Pk/Pid/2013). *Jurnal Verstek*, 4(1), 11–21.
- Sari, C. D., & C, S. (2016). TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI NGAWI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI GRATIFIKASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1914 K/Pid. Sus/2011). *Jurnal Verstek*, 4(1), 137145.